



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AWALLUDIN IKHWAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI
3. NHK : 152734

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 329.000.000

1. Bangunan Seluas 98 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah Seluas 1.380 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000
3. Bangunan Seluas 90 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 119.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.000.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 466.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 32.000.000

Sub Total Rp. 991.500.000

III. HUTANG Rp. 3.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 988.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.